

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari manajemen di dalam pengelolaan sumber daya perusahaan, laporan keuangan dapat menggambarkan kinerja perusahaan dalam periode tertentu, sehingga memuat informasi yang dapat membantu pengambilan keputusan bagi pihak internal perusahaan seperti direktur, dewan komisaris, karyawan serta pihak eksternal seperti investor, kreditor, masyarakat dan pemerintah. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan harus memenuhi tujuan, aturan serta prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku umum agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi setiap penggunaannya. Tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi laba adalah fokus utama dalam pelaporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan selama satu periode tertentu (Saragih, 2019).

Standar Akuntansi Keuangan memberikan kebebasan bagi perusahaan dalam memilih prinsip yang akan digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Salah satu prinsip yang dapat digunakan adalah prinsip kehati-hatian atau sering disebut dengan *prudence*. Namun, sejak 1 Januari 2012 Indonesia telah melakukan adopsi penuh IFRS (*International Financial Reporting Standards*) yang

mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah mengadopsi penuh IFRS. Proses ini telah dimulai dari tahap adopsi di tahun 2008 – 2010 kemudian tahun 2011 memasuki tahap persiapan akhir dan diimplementasikan di tahun 2012 (Imam, 2013). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sudah mengadopsi IFRS tersebut wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti: Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Adapun tujuan perusahaan diwajibkan menerapkan standar IFRS untuk menyetarakan laporan keuangan seluruh perusahaan di Indonesia dengan di dunia (Sinta, 2016).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang menggunakan konsep *prudence* adalah PSAK No. 14 tentang Persediaan dan PSAK No. 48 tentang Penurunan Nilai Aset. Dalam PSAK No. 14 dijelaskan bahwa persediaan dalam neraca disajikan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih, sedangkan dalam PSAK No.48 dijelaskan bahwa penurunan nilai aset merupakan rugi yang harus segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada penyajian laporan keuangan harus sesuai syarat kehati-hatian dalam mengukur aset dan laba karena aktivitas bisnis yang dilingkupi suatu ketidakpastian. Dengan tidak adanya kehati-hatian dalam menyajikan laporan keuangan, tidak menutup kemungkinan bahkan besar kemungkinan akan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan (Rohminatin, 2016).

Prinsip *prudence* adalah prinsip kehati-hatian dalam menyajikan laporan keuangan. *Prudence* membantu pengguna laporan keuangan seperti investor

dengan menyajikan laba dan aset yang tidak *overstate* (Sari, 2004). *Prudence* memiliki prinsip dalam hal pengaturan laba dimana *prudence* menggunakan kebijakan-kebijakan akuntansi untuk berusaha lebih mengakui beban atau kerugian terlebih dahulu meskipun belum terjadi dan mengakui pendapatan atau laba hanya ketika pendapatan atau laba tersebut sudah benar-benar terjadi karenanya *prudence* menyebabkan laba akan menjadi lebih kecil. Teknis penerapan *prudence* dalam perusahaan tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh manajemen sendiri (Rahardja & Herawaty, 2019).

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki ketidakpastian tinggi. Sektor ini juga wajib menyajikan laporan keuangan yang menggunakan SAK, mengikuti aturan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Abibraya (2017), pada dasarnya karakteristik industri pertambangan di Indonesia secara umum dapat dilihat dari tiga hal, yaitu: kesempatan, tantangan dan volatility (fluktuasi).

Pada sektor pertambangan dalam menjalankan proyeknya selain membutuhkan modal yang besar, umumnya juga merupakan proyek jangka panjang, sehingga dalam pengembalian modal membutuhkan waktu yang lama. Jika dalam pengelolaan proyek ini tidak dilakukan dengan baik, maka dapat menimbulkan kerugian bahkan kebangkrutan. Pernyataan di atas didukung dengan adanya kasus yang dialami PT Akibat konsumsi listrik yang turun selama pandemi covid-19, berdampak pada penurunan penjualan batubara PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Sepanjang 2020 BUMN batubara ini hanya mencetak laba bersih sebesar Rp2,4 triliun, turun dibandingkan tahun sebelumnya Rp4,06 triliun. Direktur Utama

PTBA Arviyan Arifin mengatakan, perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp2,4 triliun hingga 31 Desember 2020. Dari sisi pendapatan, PTBA membukukan sebesar Rp17,3 triliun. Sementara aset perusahaan per Desember 2020 tercatat masih kuat berada di angka Rp24,1 triliun, dengan komposisi kas setara kas dan deposito berjangka di atas 3 bulan sebesar Rp5,5 triliun atau 23% dari total aset. Sementara harga batu bara selama tahun 2020 juga menjadi tantangan tersendiri bagi perseroan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga batu bara acuan (HBA) sangat berfluktuasi sepanjang 2020. Berawal di angka USD65,93 per ton di awal Januari 2020 dan sempat menyentuh titik di bawah USD50 per ton pada September 2020. HBA mulai merangkak naik dalam 3 bulan terakhir di 2020 dan menyentuh angka USD59,65 per ton pada Desember 2020. Kenaikan ini seiring dengan mulai pulihnya permintaan batu bara di pasar global. Meskipun begitu rerata HBA sepanjang 2020 merupakan yang terendah selama 4 tahun terakhir dengan berada di level USD58,17 per ton (Sumber: <https://www.idxchannel.com/market-news/penjualan-batubara-menurun-ptba-cetak-laba-bersih-rp24-t-di-2020>, diposting pada Senin, 15 maret 2021, diakses pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 23.05).

Fenomena selanjutnya tentang kurangnya penerapan konsep *prudence* antara lain terjadi pada perusahaan sektor pertambangan subsector pertambangan logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini bermula ketika pada 15 April 2020 manajemen PT Timah Tbk (TINS) yang tiba-tiba menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2018. Perusahaan terbukti melaporkan laba yang tinggi dari keadaan yang sebenarnya (*overstated*).

Manajemen TINS melakukan revisi yang cukup signifikan. Bila sebelumnya laba bersih TINS per 31 Desember 2018 berjumlah Rp 531,35 miliar, kini direvisi menjadi Rp 132,29 miliar. Manajemen TINS menyatakan bahwa alasannya melakukan revisi ialah dikarenakan kurang catat beban pendapatan atas penjualan logam timah, saldo property investrasi yang tidak tepat, metode pengakuan pendapatan penjualan bangunan rumah yang tidak tepat, dan pajak dibayar dimuka tidak tertagih ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), diposting pada Kamis, 16 April 2020, diakses pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 23.05).

Fenomena selanjutnya yang terjadi pada sektor pertambangan terkait kurangnya penerapan prinsip *prudence* yaitu terjadi pada PT. Timah (Persero). Contohnya ada pada *press release* laporan keuangan semester I -2015 yang mengatakan bahwa efisien strategis dan membuahkan kinerja yang positif padahal kenyataannya pada semester I-2015 laba oprasi rugi sebesar Rp. 59M. Selain mengalami penurunan laba PT. Timah juga mencatat peningkatan utang hampir 100% di bandingkan 2013, pada tahun 2013, utang perseroan hanya mencapai Rp. 263M namun, jumlah utang ini meningkat hingga Rp. 2,3T pada tahun 2015. PT. Timah (Persero) Tbk memberikan laporan keuangan fiktif pada semester I –2015 lalu. Kegiatan laporan keuangan fiktif ini di lakukan guna menutupi kinerja keuangan PT. Timah (Persero) Tbk yang mengkhawatirkan. Ketua IKT (Ikatan Karyawan Timah), Ali Samsuri mengungkapkan kondisi PT. Timah (Persero) Tbk sejak 3 tahun belakangan kurang sehat, ketidak mampuan jajaran direksi menjalankan kegiatan usaha oprasional yang efisien. Pasalnya, direksi PT. Timah (Persero) Tbk menyerahkan kegiatan usahanya kepada mitra usaha lain, tidak

kepada karyawan PT. Timah (Persero) Tbk ([www.tambang.co.id](http://www.tambang.co.id), diposting pada 2015, diakses pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 23.05).

Berdasarkan kasus diatas menunjukkan kurangnya penerapan prinsip *prudence*. Sehingga dapat dilihat bahwa prinsip *prudence* perlu diterapkan pada laporan keuangan agar manajemen perusahaan tidak terlalu menonjolkan sikap optimisme dalam melaporkan laporan keuangannya. Perusahaan memilih metode akuntansi yang dianggap sesuai dengan kondisi perusahaan dan dapat mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak stabil, artinya perusahaan harus berhati-hati dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan. Tindakan kehati-hatian yang dilakukan perusahaan ini disebut sebagai *prudence*. Penggunaan prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan akan menghadapi ketidakpastian ekonomi dimasa mendatang, sehingga pengukuran, pengakuan, dan perhitungan untuk angka-angka tersebut dilakukan dengan hati-hati.

Jika laporan keuangan yang disusun tidak mengikuti *prudence*, akan mengakibatkan laba dan aset terlalu besar dalam periode berjalan sehingga tidak bisa mengantisipasi apabila terjadi kerugian. Dikhawatirkan di periode yang selanjutnya akan mengalami kerugian karena tidak mengantisipasi kemungkinan terburuk. Agar tidak terjadi kesalahan persepsi periode berjalan dengan periode yang akan datang. Oleh karena itu manajemen harus menyajikan laporan keuangan yang *prudence*. Agar dapat menyajikan laporan keuangan yang *prudence* perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi *prudence*.

Menurut Watts dalam Soraya (2014) faktor utama yaitu *Contracting Explanation*. *Contracting Explanation* merupakan upaya untuk membentuk

mekanisme kontrak yang efisien antara perusahaan dan berbagai pihak eksternal. Faktor kedua yaitu *Litigation*, yaitu risiko litigasi berkaitan dengan posisi kreditor dan investor sebagai pihak eksternal. Kemudian ada *Taxation*, yaitu penerapan konservatisme akuntansi dilakukan untuk memeperkecil pajak penghasilan perusahaan. Dan yang terakhir *Regulation*, yaitu regulator membuat serangkaian insentif bagi pelaporan agar laporan keuangan disusun secara konservatif.

Implementasi dari mekanisme *corporate governance* digunakan untuk mengendalikan para manajer dan mempertahankan pelaporan yang konservatif, sehingga manajer harus dipantau dengan menerapkan sejumlah mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* akan mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam pelaporan kondisi keuangan perusahaan, terutama yang terkait dengan prinsip *prudence* akuntansi. Mekanisme *corporate governance* seperti ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris dan tipe auditor dapat mempengaruhi penerapan prinsip *prudence* akuntansi di dalam perusahaan (Wardhani, 2017).

Dalam hal pengawasan kinerja perusahaan, dewan komisaris memiliki peran yang sangat penting. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi kinerja direksi dan manajer dalam hal kesesuaian tugas yang diberikan oleh manajemen perusahaan dan memastikan bahwa direksi dan manajer telah bekerja dengan baik demi tercapainya tujuan perusahaan. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah seluruh anggota dewan komisaris di dalam suatu perusahaan. Dengan adanya ukuran dewan komisaris yang lebih besar, maka akan mempermudah pelaksanaan tugas pengawasan kinerja di dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki

ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan mengisyaratkan tingkat *prudence* yang tinggi pula (Christy, 2019).

Dewan komisaris yang kuat akan menghasilkan *prudence* yang tinggi, sehingga dapat membantu mengurangi biaya agensi yang timbul akibat adanya informasi yang asimetris antara manajer dan pihak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa *prudence* berguna untuk dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor manajer (Ahmed & Duellman, 2017).

Komisaris independen di dalam perusahaan penting untuk diperhatikan agar terdapat independensi dalam proses pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya komisaris independen, pengawasan yang dilakukan dewan komisaris di dalam perusahaan akan lebih ketat sehingga dapat mencegah sikap oportunistik manajer. Selain itu, komisaris independen memiliki fungsi monitoring untuk mengurangi risiko kecurangan yang dilakukan manajemen dalam penyajian laporan keuangan. Komisaris independen berperan untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan untuk melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Semua komisaris pada hakekatnya harus bersikap independen dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara independen terutama untuk kepentingan perusahaan (Despiana, 2019).

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan konservatisme. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung untuk memilih akuntansi yang konservatif untuk mengatur laba agar terlihat rata



dan tidak terlalu mengalami fluktuasi. Profitabilitas juga bisa dihubungkan dengan aspek biaya politis. Karena perusahaan yang menghasilkan profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi pula sehingga akan menimbulkan aspek biaya politis yang tinggi seperti pajak yang besar. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi lebih memilih menerapkan akuntansi yang konservatif untuk tujuan mengurangi besarnya biaya politis yang harus dibayarkan.

Variabel profitabilitas yang diteliti oleh Saputri (2013) menunjukkan pengaruh positif terhadap *prudence* akuntansi. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Pratanda dan Kusmuriyanto (2014) yang menemukan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *prudence* akuntansi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Padmawati dan Fachrurrozie (2015) menemukan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *prudence* akuntansi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Nasr & Ntim (2018) terhadap prinsip *prudence* akuntansi ini telah menghasilkan penemuan yang beragam. Oleh sebab itu, penelitian mengenai hal ini masih dibutuhkan untuk menjawab berbagai masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan dan penggunaan prinsip *prudence* akuntansi. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini mengacu pada variabel yang ada di dalam penelitian Nasr & Ntim (2018). Peneliti ingin menguji kembali pengaruh ukuran dewan, independensi dewan dan tipe auditor terhadap *prudence* akuntansi.

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PRUDENCE AKUNTANSI DENGAN**

**PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)”.**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana Kepemilikan Institusional pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
2. Bagaimana Kepemilikan Manajerial pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
3. Bagaimana Ukuran Dewan Komisaris pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
4. Bagaimana Komisaris Independen pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
5. Bagaimana Komite Audit pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
6. Bagaimana *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
7. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.

8. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
9. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
10. Seberapa besar pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
11. Seberapa besar pengaruh Komisaris Independen terhadap *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
12. Seberapa besar pengaruh Komite Audit terhadap *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
13. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
14. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas memoderasi pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kepemilikan Institusional pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kepemilikan Manajerial pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Ukuran Dewan Komisaris pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Komisaris Independen pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Komite Audit pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis mengetahui bagaimana *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.

7. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
9. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
10. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
11. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Komisaris Independen terhadap *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
12. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Komite Audit terhadap *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
13. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.
14. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Profitabilitas memoderasi pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Prudence*

Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan manfaat yang dapat diambil bagi pihak yang berkepentingan dan memberikan manfaat untuk:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dalam mendukung pengembangan konsep dan teori yang sudah ada dan memperluas pengetahuan dibidang akuntansi keuangan mengenai Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Prudence* Akuntansi dengan Profitabilitas sebagai variabel Moderasi.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengaruh positif bagi pihak yang berkepentingan dan yang membutuhkan, yaitu:

###### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan mampu memenuhi pengetahuan dan pengalaman mengenai akuntansi keuangan khususnya mengenai Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Prudence* Akuntansi dengan Profitabilitas sebagai variabel Moderasi. Serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

program studi S1 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini sebagai bahan informasi untuk memberikan masukan atau saran mengenai Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Prudence* Akuntansi dengan Profitabilitas sebagai variabel Moderasi.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini menjadi bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya khususnya dalam Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Prudence* Akuntansi dengan Profitabilitas sebagai variabel Moderasi.

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk para investor yang bergelut di dunia pertambangan sehingga para investor dapat melakukan mitigasi resiko terhadap ancaman yang mungkin timbul dikemudian hari.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).